



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I PUTU GEDE SUASTRAWAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 622521

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/100 m² di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA/C70 SPD MOTOR SOLO Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.824.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 805.574.000

III. HUTANG Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 775.574.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIANA DEVI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622444

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/38 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.700.000

1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/4D7 VEGA R 110 CC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.621.686

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 534.321.686

III. HUTANG Rp. 8.136.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 526.184.886

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KADEK PUSPA JINGGA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 631147

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.430.000.000

1. Tanah Seluas 912 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 15100 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1835 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 720.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FL 125 RCD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.448.000.000

III. HUTANG Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.368.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN MERTA DANA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 522734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.400.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/5 TL (MIO S) Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA LEXI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 232.400.000

III. HUTANG Rp. 45.000.000

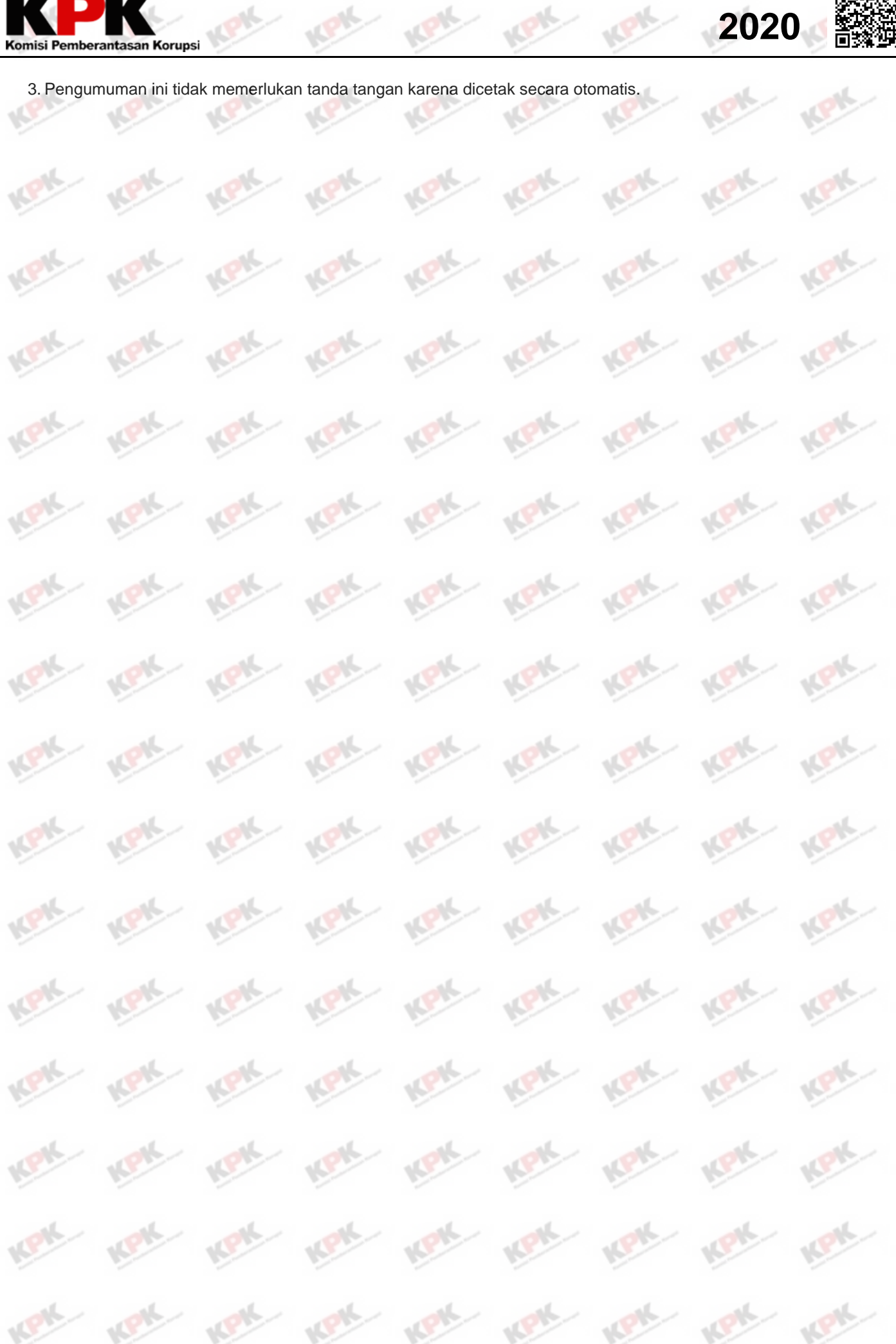
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 187.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NENGAH PUTU SUARDIKA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 522735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	40.500.000
1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	40.500.000
III. HUTANG	Rp.	10.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	30.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

